

PEMBERDAYAAN UMKM DALAM MEWUJUDKAN *SMART ECONOMY* DI DESA GUDANG KAHURIPAN KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nurazizah Ramadhaniati¹⁾

1,2,3) Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa berbasis Smart Economy. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan UMKM dalam mewujudkan Smart Economy di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menggunakan teori pemberdayaan Mardikanto dan Soebiato yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri atas perangkat desa, penanggung jawab Ruang Komunitas Digital Desa, dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM telah dilakukan melalui pelatihan literasi digital, pendampingan usaha, dan penyediaan ruang komunitas digital. Pada dimensi bina manusia terjadi peningkatan kapasitas sebagian pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital, meskipun masih terdapat kesenjangan kemampuan. Pada bina usaha, digitalisasi membantu memperluas akses pasar, namun sebagian besar UMKM masih beroperasi secara tradisional. Pada bina lingkungan, dukungan sosial telah terbentuk tetapi terkendala infrastruktur digital. Sementara itu, bina kelembagaan telah berjalan, meskipun belum optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM telah mendukung Smart Economy, tetapi masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Smart Economy, Desa, Digitalisasi, Kualitatif.

Abstract

The empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is an important strategy in supporting village economic development based on the Smart Economy concept. This study aims to analyze the empowerment of MSMEs in realizing Smart Economy in Gudang Kahuripan Village, Lembang District, West Bandung Regency, using the empowerment theory of Mardikanto and Soebiato, which consists of four dimensions: human development, business development, environmental development, and institutional development. This research employed a qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and

documentation. The informants consisted of village officials, the coordinator of the Village Digital Community Space, and MSME actors. The findings indicate that MSME empowerment has been implemented through digital literacy training, business mentoring, and the provision of a digital community space. In the human development dimension, the capacity of some MSME actors in utilizing digital technology has improved, although disparities in digital skills remain. In the business development dimension, digitalization has helped expand market access; however, most MSMEs still operate traditionally. In the environmental development dimension, social support has been established but is constrained by limited digital infrastructure. Meanwhile, institutional development has been carried out, although it is not yet optimal or sustainable. Overall, MSME empowerment has contributed to the realization of a Smart Economy, but it still requires comprehensive and sustainable strengthening.

Keywords: MSME Empowerment, Smart Economy, Village, Digitalization, Qualitative Research.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa mencakup empat aspek utama: pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Teknologi menjadi salah satu aset yang berpotensi besar untuk dioptimalkan oleh pemerintah desa dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak hanya memperbaiki mutu layanan publik, tetapi juga memainkan peran krusial dalam pengelolaan data sebagai dasar perencanaan pembangunan berkelanjutan, mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi, serta menghadirkan berbagai nilai strategis dalam pembangunan desa (Indonesia, 2014) .

Smart Village (Desa Cerdas) adalah konsep perencanaan pembangunan yang memanfaatkan data berbasis teknologi digital, untuk pengelolaan desa seperti meningkatkan kualitas layanan dasar pemerintahan dan masyarakat serta melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa (Kemendes PDTT, t.t.).

Smart village juga dapat dipahami sebagai daerah pedesaan dan masyarakat yang membangun kekuatan dan aset mereka dengan

meningkatkan jaringan dan layanan tradisional melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi, dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik untuk kepentingan penduduk dan bisnis (Visvizi & Lytras, 2018). Inisiatif pengembangan *smart Village* bertujuan untuk merevolusi penggunaan teknologi digital dalam rangka memperkuat mutu layanan publik di tingkat desa serta mendorong proses pembangunan yang berakar pada partisipasi aktif masyarakat secara adil dan berkesinambungan. Upaya ini juga dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya desa yang memiliki kemandirian dari berbagai aspek (Annshori dkk., 2024) .

Smart economy salah satu pilar kunci dalam konsep *smart village* yang berfokus pada transformasi dan pengembangan sektor ekonomi melalui pemanfaatan teknologi, inovasi dan modal intelektual. Pentingnya *smart economy* dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu peningkatan daya saing dan produktivitas yang mendorong adopsi teknologi digital yang dapat mengoptimalkan proses produksi, dan layanan sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja baru dengan munculnya sektor ekonomi baru dan model bisnis inovatif serta meningkatkan pendapatan bagi masyarakat melalui fleksibilitas kerja dan akses pasar yang lebih mudah. Peningkatan akses dan inklusi ekonomi yang dapat menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan keuangan, pasar, dan informasi bagi masyarakat di daerah terpencil atau kelompok yang sebelumnya kurang terlayani (Kemndes PD TT, t.t.) .

Digitalisasi UMKM merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kontribusi, sekitar 25,5 juta dari 64 juta UMKM di Indonesia telah terhubung dengan ekosistem digital (Nugraheni, 2025) . Digitalisasi menawarkan berbagai peluang besar bagi UMKM, salah satunya adalah kemudahan dalam memperluas akses pasar melalui *platform e-commerce*. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pelaku UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Namun, di tengah perkembangan ekonomi digital, kemampuan untuk beradaptasi menjadi sangat penting. Sayangnya, masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi digitalisasi. Rendahnya literasi digital, keterbatasan modal, serta

belum meratanya infrastruktur teknologi menjadi tantangan utama yang menghambat transformasi digital di sektor UMKM (Huwaida, 2024).

Desa gudang Kahuripan memiliki UMKM yang berjumlah 199 dari berbagai jenis seperti warung, Tani, Ternak, Kuliner dan lainnya. Dalam pemanfaatan teknologi digital yang dilakukan oleh UMKM di Desa Gudang Kahuripan sudah ada sekitar 30% yang sudah memanfaatkan Internet atau teknologi untuk mengembangkan usaha mereka, sekitar 70% UMKM belum memanfaatkan teknologi.

Tabel 1. 1 Jenis UMKM

No	Jenis UMKM	Jumlah
1	Warung	54
2	Tani	15
3	Kuliner	69
4	Ternak	41
5.	ATK dan Fotocopy	4
6.	Gas	4
7.	Dan Lain-lain	12
	Jumlah	199

Sumber: Dokumen UMKM Desa Gudang Kahuripan 2024

Dari tabel di atas UMKM di desa Gudang Kahuripan berjumlah 199 orang, sekitar 60 orang atau 30% sudah memanfaatkan teknologi Digital, sedangkan 139 orang atau 70% UMKM desa gudang Kahuripan belum memanfaatkan teknologi digital.

Pelaksanaan *smart economy* di dalam *smart village* di Desa Gudang Kahuripan ini dilakukan melalui pembentukan Ruang komunitas Digital Desa (RKDD) untuk menjadi pusat aktivitas desa dalam menuju capaian pilar desa cerdas, komunitas ini bertujuan untuk membantu dalam meningkat literasi digital seperti melakukan pelatihan, bimbingan teknis, diskusi atau musyawarah, dan sosialisasi kepada Masyarakat. Ruang Komunitas Digital desa ini di laksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan surat respons Bank Dunia pada tahun 2021. Desa Gudang Kahuripan dalam Pembangunan desa cerdas di bantu dan di dukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, Organisasi - Organisasi yang ada di desa Gudang Kahuripan, Pihak swasta dan PT. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Pemberdayaan UMKM dalam mewujudkan *smart economy* dilatarbelakangi

oleh potensi besar *Smart Economy* dalam membantu UMKM meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi ekonomi.

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dari Mardikanto dan Soebiato (2013) sebagai grand theory karena dinilai lebih relevan dalam menganalisis pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan Smart Economy. Teori ini mengembangkan konsep Tri Bina menjadi empat dimensi utama, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Bina manusia berfokus pada pengembangan kapasitas individu, kelembagaan, dan jejaring; bina usaha mencakup pengelolaan usaha, pengembangan sumber daya, kemitraan, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi; bina lingkungan menekankan pentingnya dukungan lingkungan fisik maupun sosial; sedangkan bina kelembagaan berfokus pada penguatan peran aktor, kepentingan bersama, dan aturan yang mendukung keberlanjutan program. Dibandingkan teori pemberdayaan menurut Suharto (2005) dan Suhendra (2006) yang lebih menekankan indikator umum keberdayaan masyarakat, teori Mardikanto dan Soebiato menawarkan kerangka yang lebih komprehensif, sistematis, dan sesuai untuk menganalisis aspek ekonomi, kelembagaan, serta digitalisasi yang menjadi unsur utama dalam pengembangan Smart Economy berbasis UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dari Mardikanto dan Soebiato (2013) sebagai grand theory karena dinilai lebih relevan dalam menganalisis pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan Smart Economy. Teori ini mengembangkan konsep Tri Bina menjadi empat dimensi utama, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Bina manusia berfokus pada pengembangan kapasitas individu, kelembagaan, dan jejaring; bina usaha mencakup pengelolaan usaha, pengembangan sumber daya, kemitraan, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi; bina lingkungan menekankan pentingnya dukungan lingkungan fisik maupun sosial; sedangkan bina kelembagaan berfokus pada penguatan peran aktor, kepentingan bersama, dan aturan yang mendukung keberlanjutan program. Dibandingkan teori pemberdayaan menurut Suharto

(2005) dan Suhendra (2006) yang lebih menekankan indikator umum keberdayaan masyarakat, teori Mardikanto dan Soebiato menawarkan kerangka yang lebih komprehensif, sistematis, dan sesuai untuk menganalisis aspek ekonomi, kelembagaan, serta digitalisasi yang menjadi unsur utama dalam pengembangan Smart Economy berbasis UMKM.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan *smart economy* di dalam *smart village* di Desa Gudang Kahuripan ini dilakukan melalui pembentukan Ruang komunitas Digital Desa (RKDD) untuk menjadi pusat aktivitas desa dalam menuju capaian pilar desa cerdas, komunitas ini bertujuan untuk membantu dalam meningkat literasi digital seperti melakukan pelatihan, bimbingan teknis, diskusi atau musyawarah, dan sosialisasi kepada Masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yaitu, kurangnya literasi digital terutama beretika dalam sosial media dan memahami keamanan digital serta ketidakpahaman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, Kurangnya pengetahuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk peningkatan usaha atau ekonomi mereka.

A. Bina Manusia

Bina manusia merupakan seluruh kegiatan oleh individu atau kelompok dalam pengembangan kapasitas dan upaya yang pertama dan utama yang harus di perhatikan karena manusia merupakan pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri dalam sebuah pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan Individu, Pengembangan individu dalam pemberdayaan UMKM di Desa Gudang Kahuripan difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui literasi digital sebagai bagian dari penerapan smart economy. Pemerintah desa memiliki visi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dengan memberikan pelatihan dasar mengenai pemanfaatan media sosial dan teknologi digital. Program ini bertujuan membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan dalam promosi dan pengembangan usaha sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun, hasil pengembangan individu belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM. Sebagian pelaku usaha telah

memperoleh manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi, sementara sebagian lainnya masih terkendala keterbatasan perangkat, kemampuan, dan motivasi untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan individu masih memerlukan penguatan yang lebih berkelanjutan agar seluruh pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.

Pengembangan Kelembagaan, Pengembangan kelembagaan dilakukan melalui peran komunitas digital desa dan karang taruna yang menjadi pendamping bagi pelaku UMKM dalam proses digitalisasi usaha. Komunitas digital memberikan pendampingan terkait promosi melalui media sosial, pembuatan label produk digital, dan pengelolaan akun bisnis, sedangkan karang taruna berperan dalam penyebaran informasi serta membantu masyarakat yang masih kesulitan menggunakan teknologi. Kehadiran kedua lembaga tersebut menjadi sarana penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan pelaku UMKM. Secara umum, pengembangan kelembagaan telah berjalan cukup baik karena didukung oleh kolaborasi antara pemerintah desa, komunitas digital, dan karang taruna. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya dilakukan secara top-down, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kondisi ini menjadi modal yang penting dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis smart economy yang lebih terorganisir dan berkelanjutan.

Pengembangan Kapasitas Sistem, Pengembangan kapasitas sistem berkaitan dengan kemampuan perangkat desa, pembina komunitas digital, dan pelaku UMKM dalam mengelola berbagai aspek usaha secara lebih terstruktur, seperti administrasi, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Sebagian perangkat desa dan pendamping telah memiliki kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi, namun tingkat kompetensi yang dimiliki masih beragam dan belum merata. Selain itu, kemampuan teknis yang ada belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan untuk menyampaikan materi secara efektif kepada pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan kapasitas sistem masih belum optimal dan memerlukan peningkatan yang lebih sistematis. Pelatihan lanjutan bagi

tenaga pendamping maupun pelaku UMKM diperlukan agar kemampuan dalam mengelola usaha berbasis digital dapat berkembang secara lebih baik. Dengan adanya penguatan kapasitas sistem yang berkelanjutan, program Smart Economy di Desa Gudang Kahuripan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan daya saing UMKM secara menyeluruh.

B. Bina Usaha

Bina usaha merupakan dimensi pemberdayaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan ekonomi produktif melalui peningkatan kemampuan pengelolaan usaha, akses terhadap sumber daya, serta penguatan daya saing.

Pengelolaan SDM dan Pengembangan Karir, Pengelolaan SDM dan pengembangan karir UMKM di Desa Gudang Kahuripan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan edukasi terkait pemasaran serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar mampu mengembangkan usahanya dan memperluas pasar. Beberapa pelaku UMKM telah merasakan manfaat dari digitalisasi, seperti meningkatnya jangkauan pemasaran hingga ke luar daerah dan bertambahnya peluang usaha melalui media sosial. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata karena sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara tradisional. Rendahnya literasi digital, kesulitan dalam mengoperasikan teknologi, serta minimnya pendampingan yang berkelanjutan menjadi hambatan utama. Akibatnya, pengelolaan SDM dan pengembangan karir pelaku UMKM masih belum optimal dan memerlukan pendekatan yang lebih intensif sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Pengembangan Jejaring dan Kemitraan, Pengembangan jejaring dan kemitraan dilakukan melalui pendataan UMKM, keterlibatan dalam kegiatan UMKM tingkat kabupaten, kerja sama dengan koperasi, marketplace, serta perguruan tinggi. Upaya ini bertujuan memperluas akses pemasaran, meningkatkan kolaborasi antar pelaku usaha, dan membuka peluang pengembangan usaha berbasis digital. Beberapa kelompok usaha, terutama peternak, telah memperoleh manfaat dari keberadaan jejaring dan kemitraan tersebut. Meski demikian, pengembangan jejaring dan kemitraan masih

berjalan terbatas dan belum menjangkau seluruh pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku usaha kuliner dan kreatif masih beroperasi secara mandiri tanpa wadah yang terorganisir, sementara kerja sama yang terjalin masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan jejaring dan kemitraan masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

Pengembangan Sarana dan Prasarana, Pemerintah Desa Gudang Kahuripan telah menyediakan beberapa sarana pendukung digitalisasi UMKM, seperti jaringan WiFi di titik tertentu dan fasilitas komputer di kantor desa. Penyediaan infrastruktur tersebut merupakan langkah awal untuk mendukung akses informasi, administrasi usaha, serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan adanya komitmen desa dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis smart economy. Akan tetapi, pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut masih belum optimal karena jangkauan internet belum merata dan sebagian pelaku UMKM mengalami keterbatasan ekonomi untuk mengakses layanan digital secara mandiri. Selain itu, rendahnya literasi teknologi menyebabkan sebagian besar pelaku usaha masih mengelola usahanya secara manual. Oleh karena itu, pengembangan sarana dan prasarana masih memerlukan peningkatan agar mampu mendukung transformasi digital UMKM secara lebih efektif.

Pengelolaan Sistem Informasi, Pengelolaan sistem informasi dilakukan melalui fasilitasi pelatihan digitalisasi, pendampingan administrasi usaha, serta bantuan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar pelaku UMKM dapat mengakses marketplace dan berbagai program pemerintah. Sebagian pelaku UMKM yang telah memanfaatkan media sosial dan platform digital mampu mengelola informasi usaha secara lebih efektif serta menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, pengelolaan sistem informasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan kurangnya konsistensi dalam penggunaan teknologi digital. Akibatnya, pemanfaatan sistem informasi belum berjalan merata di kalangan pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan yang lebih berkelanjutan agar seluruh pelaku

UMKM mampu mengelola sistem informasi digital secara mandiri dan optimal.

C. Bina Lingkungan

Bina lingkungan dalam teori pemberdayaan Mardikanto dan Soebiato menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan sosial tempat masyarakat beraktivitas.

Lingkungan Fisik, Lingkungan fisik dalam pemberdayaan UMKM di Desa Gudang Kahuripan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait infrastruktur digital. Meskipun pemerintah desa telah berupaya menyediakan akses internet dan sarana pendukung lainnya, kualitas jaringan masih belum merata, khususnya di wilayah peternakan dan daerah pinggiran desa. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses internet dan menerapkan teknologi digital dalam kegiatan usahanya. Akibatnya, proses digitalisasi UMKM belum dapat berjalan secara optimal. Ketidakstabilan sinyal, keterbatasan akses WiFi, serta gangguan listrik menjadi hambatan yang mengurangi kesempatan pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi secara konsisten. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan infrastruktur digital menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pengembangan Smart Economy di desa.

Lingkungan Sosial, Lingkungan sosial di Desa Gudang Kahuripan menunjukkan kondisi yang cukup kondusif bagi pengembangan UMKM. Hubungan yang erat antar pelaku usaha, dukungan komunitas digital, karang taruna, serta pemerintah desa menciptakan suasana kolaboratif yang mendorong pertukaran informasi dan pengalaman. Pendekatan berbasis komunitas dan berbagi pengalaman antar pelaku usaha juga membantu meningkatkan kepercayaan serta minat masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, keberadaan UMKM telah memberikan dampak sosial positif berupa terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa. Namun, penerapan etika digital masih bersifat informal dan belum memiliki pedoman yang jelas. Oleh karena itu, penguatan aturan dan literasi digital perlu dilakukan agar

lingkungan sosial yang sudah baik dapat semakin mendukung pengembangan UMKM berbasis Smart Economy secara berkelanjutan.

D. Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan bertujuan untuk memperkuat struktur, peran, dan mekanisme yang mengatur hubungan antar pelaku dalam proses pembangunan. Dalam konteks mewujudkan *smart economy* di Desa Gudang Kahuripan, bina kelembagaan berfungsi sebagai kerangka pengatur yang menyatukan berbagai kepentingan dan sumber daya yang terlibat dalam pengembangan UMKM.

Komponen Person atau Kemampuan Individu, Komponen person dalam program Smart Economy di Desa Gudang Kahuripan menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, komunitas digital, karang taruna, dan pelaku UMKM, telah berjalan melalui forum musyawarah dan pendampingan lapangan. Namun, proses rekrutmen anggota komunitas digital masih bersifat informal dan belum didasarkan pada standar kompetensi yang jelas. Selain itu, terdapat perbedaan kemampuan yang cukup besar antara pelaku UMKM yang sudah terbiasa menggunakan teknologi dengan mereka yang masih memiliki keterbatasan literasi digital. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara merata. Kesenjangan kompetensi antara pendamping dan pelaku UMKM, serta ketergantungan pada beberapa individu kunci dalam proses koordinasi, menjadi tantangan bagi keberlanjutan program. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas individu secara terstruktur dan merata diperlukan agar program Smart Economy dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Komponen Kepentingan atau Tujuan, Komponen kepentingan atau tujuan menunjukkan adanya keselarasan visi antara pemerintah desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM. Program Smart Economy diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas pasar melalui digitalisasi, menciptakan lapangan kerja, serta membangun ekosistem pemberdayaan yang saling mendukung. Sebagian pelaku UMKM juga mulai merasakan manfaat program melalui bertambahnya akses

informasi, pelatihan, dan jaringan usaha. Meskipun demikian, tujuan program masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur. Selain itu, implementasi tujuan belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM, terutama kelompok yang lebih tua dan kurang adaptif terhadap teknologi. Akibatnya, manfaat program masih lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha yang telah memiliki kemampuan digital dibandingkan mereka yang masih menjalankan usaha secara konvensional.

Komponen Aturan, Komponen aturan menjadi aspek yang paling lemah dalam kelembagaan program Smart Economy di Desa Gudang Kahuripan. Hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa (PERDES), Surat Keputusan (SK), maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pelaksanaan program. Kegiatan pemberdayaan masih berjalan berdasarkan kesepakatan internal, hasil musyawarah desa, serta arahan dari pemerintah desa dan komunitas digital. Ketiadaan aturan formal tersebut menyebabkan program belum memiliki landasan hukum yang kuat, mekanisme pengawasan yang jelas, maupun pedoman yang dapat menjamin konsistensi pelaksanaan. Selain itu, norma etika digital yang diterapkan masih bersifat informal sehingga belum mampu mengatasi permasalahan literasi digital secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM dalam mewujudkan Smart Economy di Desa Gudang Kahuripan masih belum optimal jika dilihat dari empat indikator menurut Mardikanto dan Soebiato (2013). Pada aspek Bina Manusia, peningkatan kapasitas pelaku UMKM masih terbatas pada literasi digital dasar, dengan kesenjangan kemampuan, keterbatasan fasilitas teknologi, serta kurangnya tenaga pendamping yang kompeten. Pada Bina Usaha, sebagian besar UMKM masih beroperasi secara tradisional karena rendahnya literasi digital dan minimnya pendampingan, meskipun ada sebagian kecil yang sudah mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Selanjutnya, pada Bina Lingkungan, terdapat hambatan infrastruktur seperti jaringan internet yang

belum stabil, meskipun modal sosial dan kolaborasi antar pelaku UMKM sudah cukup kuat. Namun, norma digital masih bersifat informal. Sementara itu, pada Bina Kelembagaan, kelemahan paling mendasar terlihat dari belum adanya regulasi formal seperti PERDES, SK, maupun SOP, sehingga program pemberdayaan belum memiliki landasan hukum, mekanisme pengawasan, dan aturan yang jelas.

Secara keseluruhan, keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di lokasi penelitian masih perlu penguatan dari sisi kapasitas SDM, sistem usaha, infrastruktur lingkungan, dan terutama kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annshori, M. F., Bela, H. Y., & Mikyal Marshalita, M. (2024). Insight Industry 4.0: An Answer to Smart Village Policy Transformation in Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 1602–1610. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.922>
- Desa Gudangkahuripan. (2025a). *Data Pelaku Usaha Mikro Desa Gudangkahuripan Kec. Lembang Kab. Bandung Barat*.
- Huwaida, N. (2024, Oktober 14). Digitalisasi dan Tantangan UMKM di Era Ekonomi Digital: Peluang dan Hambatan dalam Meningkatkan Daya Saing di Pasar Global. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/nabilahuwaida9498/670d198ced641521b829c0d2/digitalisasi-dan-tantangan-umkm-di-era-ekonomi-digital-peluang-dan-hambatan-dalam-meningkatkan-daya-saing-di-pasar-global>
- Indonesia, P. P. (2014). *UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Kementrian Komunikasi dan DIgital. (2024). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024*.
- Kemndes PDTT. (t.t.). *Kepmen-Desa-PDPT-Nomor-55-Tahun-2024-ttg-Panduan-Umum-Pengembangan-Desa-Cerdas*. Diambil 24 Mei 2025, dari <https://infoperaturan.id/keputusan-menteri-des-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-nomor-55-tahun-2024/>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Nugraheni, A. (2025, Mei 7). Optimalisasi Platform DIgital Memperkuat Pasar Indonesia. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/optimalisasi-platform-digital-memperkuat-pasar-umkm>